BAB II KAJIAN TEORI

# Implementasi

* + 1. **Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Hulian Barus. (2014) Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian

dan kejelasanakan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.Yaitu suatu kegiatan yang di rencanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Deddy Mulyadi (2016 : 24) implementasi berkenaan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasi dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Guntur Setiawan (2004) Implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang efektif.

14

# Tahapan Implementasi

Menurut George C Edwards III dalam Agustino (2014:149-152) Menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan yaitu :

# Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan percapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang di ketahui para pengambil keputusan hanya bisa di dapat melalui komunikasi yang baik.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi.

* + - * 1. Sumber daya.

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

* + - * 1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagian kankan

oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi di perlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang di inginkan oleh kebijakan itu sendiri.

* + - * 1. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

* + - * 1. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

* + - * 1. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya,

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

* + - * 1. Disposisi.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal–hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

1. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
2. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.
	* + - 1. Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijaksanaan. Maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah :

1. Standar Operating Prosedures (SOP), adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).
2. Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

# Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis

pelaksanaan suatu perkerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi,karena dua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan kedalam bahasa Indonesia.Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya.Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Ealau dan Prewit (Suharto, 2010:7), kebijakan adalah “sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang kosisten dan berulang,baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”.

# Proses Kebijakan

Menurut Winarno (2007:29), menyatakan bahwa masing-masing alternative bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Keputusan kebijakan merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan itu berlangsung.Pada saat proses kebijakan bergerak kearah proses pembuatan keputusan,maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul yang lain akan ditolak dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijakan hanya formalitas.Untuk membuat keputusan kebijakan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu :

# 2.3.1. Tahap Perumusan

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam sebuah kebijakan.

# Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain,misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

# Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah.

Tahap ini perumusan kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai faktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

# Tahap Penetapan Kebijakan

Alternatif kebijakan diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan undang-undang, keputusan presiden, keputusan-keputusan kementrian dan lain sebagainya.

# Program Pelatihan

* + 1. **Pengertian Program**

Kata program berasal dari bahasa Inggris “programe” yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan

oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu. Secara umum pengertianprogram adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang di implementasikan. Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008:9) mengemukakan defenisi program sebagai “ segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”.

# Pengertian Pelatihan

Pelatihan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang di berikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar teliti dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku pintar hidup sehari-hari, bimbingan dan nasehat yang memotivasinya agar giat belajar), serta ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Menurut Widodo (2015: 82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang professional di bidangnya. Pelatihan

adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar.

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan.Pendidikan nonformal adalah jenis pendidikan yang tidak terikat oleh struktur formal seperti sekolah atau universitas, melainkan mencakup berbagai kegiatan belajar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan individu di luar konteks formal, khususnya menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal. Tujuan utama pendidikan non formal adalah memberikan akses pendidikan bagi individu yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, membantu pemulihan pendidikan bagi mereka yang putus sekolah, serta mempromosikan inklusi sosial dan kemandirian. Program-program pendidikan nonformal, seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, program pemulihan pendidikan, dan kursus pendidikan bagi orang dewasa, ditawarkan dengan fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan kurikulum, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan preferensi peserta.

# Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga pendidikan non formal yang berperan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat di tingkat lokal dengan tujuan utama memberikan akses

pendidikan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan. PKBM umumnya menawarkan beragam program pendidikan, mulai dari Program Paket A (setara SD) hingga Program Paket C (setara SMA), dan seringkali berbasis komunitas dengan jaringan yang luas, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Kontribusi PKBM sangat signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan, serta membentuk individu yang lebih terampil, berpengetahuan, dan inklusif secara sosial.

# Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Literatur yang membahas materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menyajikan definisi dan ruang lingkup pembelajaran yang mencakup nilai-nilai Pancasila dan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, serta tujuan pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan. Metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dan simulasi dipakai untuk mendorong pemahaman dan partisipasi aktif siswa dalam isu-isu kontemporer dan proses demokrasi. Evaluasi pembelajaran tidak hanya mengukur pengetahuan akademis, tetapi juga sikap kewarganegaraan siswa melalui asesmen sikap dan penilaian proyek

kewarganegaraan. Dengan demikian, pembelajaran PPKn memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan siswa secara holistik.

# Sikap Toleransi

Sikap toleransi merujuk pada kemampuan untuk menerima perbedaan, menghargai keragaman, dan berkomunikasi secara terbuka dengan individu atau kelompok yang memiliki pandangan, budaya, atau latar belakang yang berbeda. Studi- studi tentang sikap toleransi mencakup faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan sikap tersebut, seperti pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial. Literatur juga mempertimbangkan dampak positif sikap toleransi dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Melalui pemahaman dan praktik sikap toleransi, masyarakat dapat mengatasi konflik, memperkuat hubungan antarindividu dan antarkelompok, serta mempromosikan perdamaian dan kerukunan sosial di berbagai tingkatan.

# Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan oleh guru atau praktisi pendidikan untuk meningkatkan praktik pembelajaran dan mencapai perubahan positif dalam kelas atau lingkungan belajar lainnya. Literatur ini menjelaskan langkah-langkah dalam pelaksanaan PTK, termasuk identifikasi masalah, perencanaan tindakan, implementasi, observasi, refleksi, dan evaluasi. Studi-studi kasus dan penelitian empiris mengenai PTK juga memberikan contoh-contoh praktis

tentang bagaimana PTK dapat digunakan untuk memperbaiki praktik pembelajaran, mengatasi tantangan dalam pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, literatur ini membahas keuntungan dan tantangan dalam pelaksanaan PTK, serta cara untuk mengoptimalkan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan konsep PTK, guru dan praktisi pendidikan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik.